



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
SEKRETARIAT DPRD



TAHUN 2024

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Telp : (0370) 655075

Jalan Raya Praya-Kopang, Jontlak - Lombok Tengah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang telah disusun dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Adapun Rencana Kerja ini menggambarkan arah kebijakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini secara umum adalah melaporkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu tolok ukur pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah. Laporan ini memuat secara rinci dan lengkap pencapaian kinerja suatu instansi terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan/sasaran, kebijakan dan program yang disusun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Praya, 12 Juli 2023  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Lombok Tengah, 7



**SUHADI KANA, S.Sos., M.H.**  
NIP.197405151997031009

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022 ..</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD.....	21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>37</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja .....	39
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah ....	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.....	25
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah .....	29
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah.....	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah .....	39
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	43

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021—2026. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021—2026 yang mendukung Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021—2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD Tahun 2021—2026 Kabupaten Lombok Tengah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
2. Mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program inovatif yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mewujudkan sinergitas. efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan 2 program dan 13 kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kegiatan-kegiatan pokok yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan telah pula diselesaikan sesuai dengan jadwal. Tak terkecuali kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan tersebut di atas. Realisasi anggaran dan capaian target dari masing-masing kegiatan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

##### a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah :

##### 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD atau alat kelengkapan DPRD lainnya selama tahun 2022. baik berupa Ranperda Inisiatif DPRD maupun Ranperda Usul Pemerintah.

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.995.298.136 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output	:	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas dengan target sebesar (65%) terdiri dari :
		Ranperda Inisiatif DPRD = 3 Buah
		Ranperda Usul pemerintah = 3 Buah
		Dokumen Kesepakatan lain = - Buah
Outcome	:	Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Realisasi	:	Keuangan = Rp.638.063.668 (64.11%)
		Fisik = 3 buah Peraturan Daerah (Perda) atau sebesar (50%) yaitu semuanya merupakan Perda Usul Pemerintah

Adapun Peraturan Daerah Usul Pemerintah yang telah ditetapkan adalah:

- Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhi Mandalika;
- Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

Adapun Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat memiliki anggaran sebesar Rp.5.891.421.552 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.862.450.700 (99.51%) dan realisasi Fisik sebesar (96.77%) yang terdiri dari:

### **a) Pelaksanaan Reses**

Kegiatan Reses ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai persoalan dan kendala dalam proses pembangunan daerah. Untuk Tahun 2022 kegiatan Reses dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian reses dilaksanakan setiap masa sidang. Masa sidang DPRD ditetapkan sebanyak 3 kali dalam setahun. Pelaksanaan kegiatan reses dilaksanakan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD di Kabupaten Lombok Tengah dengan mengundang konstituen untuk melakukan audiensi di tempat-tempat pertemuan informal seperti di Masjid, Aula Kantor Desa, Aula Pondok Pesantren maupun rumah tokoh masyarakat/Kepala Dusun. Adapun pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

Output : Dokumen Aspirasi Masyarakat sebanyak 3 dokumen  
Outcome : Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Realisasi : Fisik = 3 dokumen Aspirasi Masyarakat (100 %)

### **b) Hearing atau dengar pendapat**

Kegiatan Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka hearing atau dengar pendapat dengan Tokoh masyarakat/agama/adat, LSM serta organisasi kemasyarakatan lainnya terhadap permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2022.

Output : Dokumen notulen hearing sebanyak 28 dokumen  
Outcome : Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Realisasi : Fisik = 27 dokumen notulen hearing (96.43%)

## **3) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD ini dimaksudkan untuk memfasilitasi tugas-tugas DPRD dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan fungsi DPRD. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.35.661.237 dengan realisasi Rp.31.824.400 atau

(89.24%) serta memiliki target fisik 21 Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD dengan realisasi 19 Dokumen atau (90.48%). Adapun sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Laporan Kinerja DPRD selama satu Tahun Anggaran. Adapun capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Laporan Kinerja DPRD sebanyak 1 dokumen  
Outcome : Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Realisasi : Fisik = 1 Dokumen Laporan Kinerja DPRD (100%)

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat Badan Musyawarah dalam merumuskan jadwal kegiatan dalam suatu periode/masa tertentu. Adapun capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Rapat Badan Musyawarah sebanyak 8 dokumen  
Outcome : Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Realisasi : Fisik = 13 Dokumen Rapat Badan Musyawarah (162.5%)

c) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD ini dimaksudkan untuk memfasilitasi rapat-rapat Pimpinan DPRD dan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD lainnya. Adapun capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Rapat Pimpinan DPRD sebanyak 12 dokumen  
Outcome : Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  
Realisasi : Fisik = 5 Dokumen Pimpinan DPRD (41.67%)

**b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.**

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target yang direncanakan adalah:

**1) Pembahasan Kebijakan Anggaran**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kebijakan anggaran baik berupa Nota Kesepakatan maupun dokumen Pembahasan APBD. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp459.704.095 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen kebijakan anggaran dengan target sebanyak 5 dokumen terdiri dari :

	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	= 1 Dokumen
	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan	= 1 Dokumen
	Dokumen hasil pembahasan APBD	= 1 Dokumen
	Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	= 1 Dokumen
	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	= 1 Dokumen
Outcome	: Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
Realisasi	: Keuangan = Rp.395.589.500 (86.09%)	
	Fisik	= 5 buah dokumen atau sebesar 100%.

## 2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ini dimaksudkan untuk membiayai Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis, Kunjungan Kerja, Studi Banding dan rapat Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (ADKASI) serta publikasi kegiatan/agenda DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sub kegiatan adalah sebagai berikut :

### a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman anggota DPRD sebagai bekal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Pemahaman yang luas dari anggota DPRD akan berdampak terhadap kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.3.491.411.161 dengan capaian terhadap indikator kinerja sebagai berikut :

Output	: Dokumen Laporan Bimbingan Teknis sebanyak 4 dokumen
Outcome	: Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Realisasi	: Keuangan sebesar Rp.3.469.644.911 (99.38%)
	Fisik = 4 Dokumen Laporan Bimbingan Teknis (100%)

### b) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Sub Kegiatan Publikasi dan dokumentasi dewan ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Bagian Humas dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai. Kegiatan-kegiatan DPRD melalui Media Massa seperti Koran Nasional, Koran Lokal, Media Elektronik (Radio dan TV) dan Media Online. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.2.157.713.139 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output	: Jumlah Berita Parlementaria TV (5 Stasiun)	= 60 Kali
	Jumlah Pemberitaan Parlementaria Radio	= 70 Kali

(5 Stasiun)

Parlementaria Koran (12 Media)	=	295 Kali
Parlementaria Media Online (25 Media)	=	100 Kali
Tabloid SWARA	=	6 Edisi

Outcome : Meningkatnya kerjasama publikasi dan media massa

Realisasi : Keuangan sebesar Rp2.134.144.055 (98.91%)

Fisik

Jumlah Berita Parlementaria TV (5 Stasiun) = 60 Kali (100%)

Jumlah Pemberitaan Parlemenaris Radio = 70 Kali (100%)

(5 Stasiun)

Parlementaria Koran (12 Media) = 295 Kali (100%)

Parlementaria Media Online (25 Media) = 100 Kali (100%)

Tabloid SWARA = 6 Edisi (100%)

### 3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan pengawasan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD selain fungsi *budgeting* dan fungsi legislasi. Pengawasan dilakukan oleh Komisi berdasarkan *leading sector* masing-masing Komisi. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.112,833,467 dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen hasil pengawasan DPRD dengan target sebanyak 6 dokumen terdiri dari :

Dokumen pengawasan bidang pemerintahan dan hukum = 1 Dokumen

Dokumen pengawasan bidang Infrastruktur = 1 Dokumen

Dokumen pengawasan bidang Kesra = 1 Dokumen

Dokumen pengawasan bidang Ekonomi = 1 Dokumen

Dokumen Pengawasan Tindak LHP oleh BPK = 1 Dokumen

Dokumen hasil Pembahasan LKJP = 1 Dokumen

Outcome : Meningkatnya kinerja lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Realisasi : Keuangan = Rp.92.412.700,00 (81.90%)

Fisik = 6 buah dokumen atau sebesar (100%).

#### c. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya tidak tercapainya target kinerja

Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kegiatan-kegiatan adalah:

1. Adanya Ranperda yang sudah dibahas namun masih dalam proses harmonisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga belum

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Adapun Ranperda yang masih dalam proses harmonisasi adalah:

- Ranperda tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan;
  - Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
  - Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan perempuan Korban Kekerasan.
2. Kami menduga menurunnya jumlah hearing/rapat dengar pendapat menunjukkan semakin kondusifnya kehidupan sosial masyarakat. Konflik-konflik kecil sudah mampu diselesaikan pada tingkat paling bawah sehingga tidak perlu melibatkan anggota DPRD sebagai mediator bagi solusi permasalahan yang dihadapi;
  3. Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan seringkali dilaksanakan secara informal sehingga tidak terdokumentasi.

**e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah**

Dampak yang ditimbulkan dari tidak tercapainya target tersebut khususnya kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat adalah tidak terserap secara maksimal aspirasi masyarakat kepada DPRD yang mana hal tersebut merupakan indikator bagi berhasil atau tidaknya DPRD dalam mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat yang memilihnya.

**f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Sekretariat DPRD melakukan peninjauan kembali terhadap penentuan target kegiatan-kegiatan agar lebih rasional sesuai fakta sehingga berdampak pada penyesuaian besaran anggaran. Penyesuaian target ini memerlukan pembahasan yang mendalam terkait dengan agenda seluruh rapat yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhitungkan aspek urgensi dan prioritas.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>4 02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
<b>4 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>BB</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>CC</b>	<b>100</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>100</b>
4 02 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
4 02 01 2.01 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.01 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.01 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.01 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.01 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16	16	16	100	16	16	100
4 02 01 2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Temuan hasil Pemeriksaan OPD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4 02 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	55	55	100	55	55	100
4 02 01 2.02 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.02 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	2	2	100	2	2	100
4 02 01 2.02 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	13	13	100	13	13	100
4 02 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.06 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	10	1	3	300	-	-	-
4 02 01 2.06 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	50	50	100	50	50	100
4 02 01 2.06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6	6	6	100	6	6	100
4 02 01 2.06 07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
4 02 01 2.06 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66	66	66	66	100	66	66	100
4 02 01 2.06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	11	11	11	100	11	11	100
4 02 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Validasi data aset OPD	-	-	-	-	-	100	100	100
4 02 01 2.07 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	1	100
4 02 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.07 05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
4 02 01 2.02 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
4 02 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	31	31	31	100	31	31	100
4 02 01 2.09 05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	25	25	25	100	25	25	100
4 02 01 2.09 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	3	100
4 02 01 2.09 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3	-	-	-	-	-	-	-
4 02 01 2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 01 2.15 01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	50	50	100	50	50	100
4 02 01 2.15 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	2	2	2	100	5	5	100
4 02 01 2.15 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	50	50	50	100	50	50	100
4 02 01 2.16	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase rapat yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 01 2.16 02	Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9	-	9	9	100	9	9	100
4 02 01 2.16 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	130	59	114	114	100	130	130	100
<b>4 02 02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas</b>	<b>75</b>	<b>133,33</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>76,92</b>	<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>100</b>
4 02 02 2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	75	133,33	65	50	76,92	67,50	67,50	100
4 02 02 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	-	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.01 02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	8	12	6	50	12	12	100
4 02 02 2.01 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.01 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	-	5	3	60	4	4	100
4 02 02 2.01 05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100	-	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.02 01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	-	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.02 04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.02 06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan	100	-	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.03 01	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 02	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 03	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 04	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.03 06	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	-	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.03 08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.04 01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.04 02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	4	3	6	200	6	6	100
4 02 02 2.04 03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510	462	525	525	100	510	510	100
4 02 02 2.04 04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	10	10	10	100	10	10	100
4 02 02 2.04 05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	9	9	9	100	9	9	100
4 02 02 2.04 06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.04 07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
4 02 02 2.05 01	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	-	1	3	300	3	3	100
4 02 02 2.05 02	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	-	1	1	100	1	1	100
4 02 02 2.05 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	38	23	31	30	96,77	46	46	100
4 02 02 2.06	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan	Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.06 02	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	-	-	-	-	-	-	-
4 02 02 2.07	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 02 02 2.07 01	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	-	-	-	-	-	-	
4 02 02 2.07 02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	-	-	-	-	-	-	
4 02 02 2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	
4 02 02 2.08 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	3	-	-	1	1	100	
4 02 02 2.08 02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	-	1	1	100	1	100	
4 02 02 2.08 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	-	8	13	162,5	8	100	
4 02 02 2.08 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	-	12	5	41,67	12	100	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

### a. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sesuai Renstra Tahun 2021—2026 adalah Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD. Untuk mengukur Capaian Kinerja 2022, dilakukan survei terhadap 46 anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai sampel/responden dari 50 orang populasi.

Teknik pengumpulan data dalam survei adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif. Responden diminta untuk memberikan respon yang sesuai dengan pengalaman dan persepsinya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian diberikan sejumlah pertanyaan yang sama dan jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Analisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan layanan administratif Sekretariat DPRD. Teknik analisa data yang digunakan mencakup statistik deskriptif. Teknik analisis indeks kepuasan.

Untuk melihat gambaran umum subjek penelitian dilakukan perhitungan persentase, rata-rata (*mean*) serta penyebaran usia dan jenis kelamin subjek melalui statistik deskriptif. Analisa data dari variable-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administratif Sekretariat DPRD dilakukan dengan statistik deskriptif.

Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert dengan rentang 1 sampai dengan 5 (*skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas. 2 = Tidak Puas. 3 = Kurang Puas. 4 = Puas. dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas*). Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna

layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Perhitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

Dimana:

$T$  = jumlah responden

$P_n$  = skor 1.2.3.4.5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Sangat Puas” dikalikan 5
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Puas” dikalikan 4
3. KP (Kurang Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Kurang Puas” dikalikan 3
4. TP (Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Tidak Puas” dikalikan 2
5. STP (Sangat Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab “Sangat Tidak Puas” dikalikan 1

Selanjutnya semua hasil 1—5 dijumlahkan menjadi Total Skor. Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor tertinggi Likert} \times \text{jumlah responden}$$

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RUMUS INDEKS \%} = \frac{\text{Total Skor} \times 100\%}{Y}$$

Berdasarkan Laporan hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD Tahun 2022 dengan melakukan survei atas persepsi dan pendapat Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD pada masing-masing Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung agenda kerja DPRD. Dengan menggunakan formulasi tersebut di atas, maka akan diperoleh hasil perhitungan masing-masing Bagian sebagai berikut :

Bagian	Total Skor
Bagian Persidangan	177.00
Bagian Umum	171.80
Bagian Humas	169.60
Bagian Keuangan	176.00
<b>TOTAL SKOR</b>	<b>173.60</b>

Total Skor	=	173.60
Y	=	5 x 46 orang
	=	230

Indeks Kepuasan	=	$\frac{173.60}{230} \times 100\% = 75.48\%$
-----------------	---	---

Nilai Peringkat Kinerja : **PUAS**

#### b. Kendala dan Hambatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja dan memfasilitasi kegiatan DPRD masih ditemui berbagai kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi adalah :

1. Masih belum disiplin Anggota DPRD didalam melakukan rapat-rapat sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Seringkali pelaksanaan tugas DPRD baik berupa rapat-rapat maupun kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan secara mendadak tanpa terjadwal sebelumnya sehingga fasilitasi terhadap kegiatan tersebut tidak maksimal.

#### c. Solusi

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut di atas adalah:

1. Menghimbau kepada anggota DPRD baik melalui Pimpinan DPRD maupun Pimpinan Fraksi untuk disiplin didalam melaksanakan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Sekretariat DPRD lebih intens didalam melakukan komunikasi dengan anggota DPRD terkait agenda-agenda yang sedang/akan dilaksanakan. Intensitas komunikasi ini perlu dilakukan bukan hanya pada jam kerja saja tetapi dapat dilakukan diluar jam kerja.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan layanan administrasi DPRD			76,50	75,75	76,00	76,25	75,48	75,48	76,00	76,25	
2	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas			65,00	67,50	70,00	72,50	50,00	50,00	70,00	72,50	
3	Persentase Perda yang ditetapkan			65,00	67,50	70,00	72,50	50,00	50,00	70,00	72,50	
4	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelaksanaan pengawasan			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam			100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD merupakan salah satu tujuan dari Sekretariat DPRD dan menjadi barometer bagi tercapainya keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Namun, dinamika yang masif menuntut pelayanan kepada Anggota DPRD menjadi lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk mendorong terciptanya pelayanan yang efisien dan responsif. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kepada Anggota DPRD akan mendorong terciptanya pelayanan yang lebih baik, karena Tujuan akhir dari pelayanan dan fasilitasi tersebut adalah peningkatan kinerja DPRD yang dapat dicapai diantaranya dengan menyediakan dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut otomatis juga dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mau tidak mau harus adaptif dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi baik itu teknologi terapan maupun teknologi informasi bermanfaat untuk :

#### **1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat**

Penyebarluasan informasi tentang aktifitas DPRD dapat disampaikan secara massif kepada masyarakat. Informasi tentang agenda dan produk DPRD tersebut dapat disediakan melalui website DPRD 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke Sekretariat DPRD.

#### **2. Peningkatan hubungan antara lembaga DPRD dengan masyarakat umum**

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara DPRD selaku wakil rakyat dengan konstituen atau masyarakat secara luas menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dari banyak pihak.

#### **3. Kemudahan dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD**

a. Penggunaan teknologi berupa perangkat elektronik yang menjadi media penerima dan penyimpan seperti Tablet atau sejenisnya perlu dimiliki oleh semua Anggota DPRD sebagai fasilitas dalam mempermudah pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, seperti menerima surat undangan Rapat Paripurna. Hal ini penting untuk efektifitas dan efisiensi kinerja DPRD. Saat ini pada setiap agenda rapat paripurna DPRD, Sekretariat DPRD harus menyampaikan undangan kepada masing-masing anggota DPRD untuk menghadiri rapat tersebut secara manual. Terkadang penyampaian surat tersebut tidak dapat dilakukan di Kantor, melainkan harus

diantar sampai dengan domisili/ alamat anggota DPRD tersebut, hal ini sering muncul kendala dalam proses penyampaiannya antara lain, karena cuaca, hujan dll.

- b. Penggunaan aplikasi pencarian perundang-undangan sebagai media yang menyajikan seluruh produk perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah pusat baik berupa UU, PP, Inpres dll. Aplikasi ini sangat diperlukan karena dalam pembahasan produk perundang-undangan, Anggota DPRD perlu didukung dengan produk hukum di atasnya yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yang sedang dibahas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya disharmonisasi antara produk hukum daerah dengan produk hukum pusat. Teknologi ini memungkinkan pihak Sekretariat DPRD dapat menyajikan Regulasi (produk perundang-undangan) yang dimaksud dengan cara cepat dan tepat.
- c. Penggunaan teknologi *translater from Voice to letter*, untuk mempermudah pembuatan notulen rapat. Alat ini secara otomatis akan menerjemahkan suara ke dalam bentuk tulisan secara otomatis selama rapat berlangsung, Hal ini dapat mempercepat proses notulensi setiap rapat.

Tuntutan DPRD akan fasilitasi yang semakin professional sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur Sekretariat DPRD. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan administrasi melalui pemanfaatan sistem informasi untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan anggota DPRD.

Dalam sektor pemerintah secara umum, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah. Berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah :

**Tabel 2.3**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun  
2024 Kabupaten Lombok Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Kab. Lombok Tengah	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	70	9.137.135.391	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Kab. Lombok Tengah	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	70	13.806.928.304	
1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase Perda yang ditetapkan	70	1.024.586.064	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase Perda yang ditetapkan	67,5	801.187.118	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	13.130.872	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	153.244.685	
1.2	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	778.443.353	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	376.107.583	
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	201.950.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	220.000.000	
1.4	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	31.061.839	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	61.834.850	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100	339.446.324	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100	673.883.969	
2.1	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	35.266.735	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	120.089.475	
2.2	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	34.837.975	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	100.003.354	
2.3	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	69.173.796	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	169.319.172	
2.4	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	160.287.516	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	124.199.603	
2.5	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	39.880.302	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	160.272.365	
3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan pengawasan	100	284.900.845	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan pengawasan	100	53.240.000	
3.1	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	50.938.219	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	8.651.500	
3.2	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	50.954.436	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	9.982.500	
3.3	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	50.363.436	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	8.651.500	
3.4	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	51.012.936	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	8.651.500	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
3.5	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	41.785.219	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	8.651.500	
3.6	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	39.846.599	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	8.651.500	
4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	100	3.005.861.186	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam	100	5.677.628.625	
4.1	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	3.206.724	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	535.000.000	
4.2	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	633.662.724	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	1.914.680.768	
4.3	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510	1.630.921.029	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510	2.256.862.857	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	410.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	479.160.000	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	324.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	431.244.000	
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	40.716.000	
4.7	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	3.670.709	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	19.965.000	
5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu	100	4.000.143.375	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah	Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu	100	5.246.506.877	
5.1	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	42.615.733	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	18.823.002	

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
5.2	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	12.568.381	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	13.765.202	
5.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	40	3.944.959.261	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	42	4,739,926,067	
6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	-	-	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100	7.200.000	
6.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kode Etik DPRD	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kode Etik DPRD	-	-	
6.2	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Pengawasan Kode Etik	-	-	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Pengawasan Kode Etik		7.200.000	
7	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	-	-	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100	10.967.440	
7.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kerjasama Daerah	-	-	Sub Kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kab. Lombok Tengah	Dokumen Kerjasama Daerah	1	6.693.720	
7.2	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Lombok Tengah	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Lombok Tengah	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi	1	4.273.720	
8	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	482.197.597	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	100	1.336.314.274	
8.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8	438.676.412	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8	1.094.134.166	
8.2	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	7.388.261	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	10.812.379	
8.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	31.322.219	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8	81.789.950	
8.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	4.810.705	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	149.577.780	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada tahun 2024. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan 2 program dan 16 kegiatan termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

### **2.5.1. Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

### **2.5.2. Kegiatan**

1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
8. Layanan Administrasi DPRD;
9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Peningkatan Kapasitas DPRD;
13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
14. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
15. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
16. Fasilitasi Tugas DPRD.

### **2.5.3. Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
17. Penyediaan Bahan /Material;
18. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21. Pengadaan Meubel;
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
25. Pemeliharaan Mebel;
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
29. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
30. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
31. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
32. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
33. Fasilitasi Fraksi DPRD;
34. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
35. Fasilitasi Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;
36. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
37. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
38. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
39. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
40. Penyusunan Tata Tertib DPRD;
41. Pembahasan KUA dan PPAS;
42. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
43. Pembahasan APBD;
44. Pembahasan APBD Perubahan;
45. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;

46. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
47. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
48. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
49. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
50. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
51. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
52. Orientasi DPRD;
53. Pendalaman Tugas DPRD/Bimtek DPRD;
54. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
55. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
56. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
57. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
58. Penyusunan Program Kerja DPRD;
59. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
60. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
61. Pelaksanaan Reses;
62. Pengawasan Kode Etik DPRD;
63. Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
64. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
65. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
66. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
67. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
68. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
69. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Lombok Tengah**

No	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan administratif dan mendukung tugas dan fungsi DPRD. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD tidak secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tidak melalui proses musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Akibatnya, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Lombok Tengah saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021—2026, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah adalah **“Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”**.

Di sisi lain sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terjadinya Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah dengan memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan dan Kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dibangun berdasarkan 4 (empat) Pilar Kebijakan Pembangunan yaitu :

1. Pembangunan yang berorientasi pada kemiskinan (*pro poor*);
2. Pembangunan yang berorientasi pada perluasan ketenagakerjaan (*pro job*);
3. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
4. Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup (*Pro environmental*).

Keempat pilar kebijakan pembangunan nasional itu harus didukung dan diperkuat dengan program dan kebijakan daerah yang searah dan sebangun sehingga tercapai sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Peran pemerintah daerah yaitu eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan arah kebijakan nasional tersebut.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

### 3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Oleh karena itu dalam tujuan rumusan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan secara lebih operasional untuk menentukan misi dengan memperhatikan isu strategis daerah yang disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun;
2. Harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan pokok fungsi organisasi;
4. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama satu tahun;
5. Tujuan organisasi mewakili tujuan umum seluruh unit kerja;
6. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dimaksud.

Berdasarkan makna tujuan organisasi tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan misinya telah menentukan tujuan yaitu **“Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada DPRD”**.

### 3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun

ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yaitu **“Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu**

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada DPRD	Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu		100%

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan 2 program dan 16 kegiatan. termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.3.1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;

#### 3.3.2. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
8. Layanan Administrasi DPRD;
9. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
10. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

12. Peningkatan Kapasitas DPRD;
13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
14. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
15. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
16. Fasilitasi Tugas DPRD.

### **3.3.3. Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
17. Penyediaan Bahan /Material;
18. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21. Pengadaan Meubel;
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
25. Pemeliharaan Mebel;
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
29. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
30. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
31. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
32. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
33. Fasilitasi Fraksi DPRD;
34. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
35. Fasilitasi Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;
36. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
37. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
38. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
39. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik;
40. Penyusunan Tata Tertib DPRD;
41. Pembahasan KUA dan PPAS;
42. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
43. Pembahasan APBD;
44. Pembahasan APBD Perubahan;
45. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
46. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum;
47. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
48. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
49. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
50. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
51. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
52. Orientasi DPRD;
53. Pendalaman Tugas DPRD/Bimtek DPRD;
54. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
55. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
56. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
57. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
58. Penyusunan Program Kerja DPRD;
59. Kunjungan Kerja dalam Daerah;
60. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
61. Pelaksanaan Reses;
62. Pengawasan Kode Etik DPRD;

63. Fasilitasi. Verifikasi. dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah;
64. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
65. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
66. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
67. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
68. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
69. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Tabel 4.1**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4						<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
4	02					SEKRETARIAT DPRD		100%	43.664.288.126	DAU	-	100%	61.379.194.544
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	34.527.152.735			100%	46.969.091.745
4	02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja OPD	22 Dokumen	40.452.012	DAU	-	22 Dokumen	42.938.315
							Persentase IKU OPD yang tercapai	100%				100%	
4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	5.214.253	DAU	-	4 Dokumen	7.156.386
4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.672.718	DAU	-	1 Dokumen	7.156.386
4	02	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.663.383	DAU	-	1 Dokumen	7.156.386
4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.159.986	DAU	-	1 Dokumen	7.156.386
4	02	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.659.986	DAU	-	1 Dokumen	7.156.386

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Dokumen	6.081.686	DAU	-	16 Dokumen	7.156.386
4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	19 dokumen	4.739.640.095	DAU	-	19 dokumen	6.422.218.831
							Persentase Temuan hasil Pemeriksaan OPD	100%				100%	
4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang / 12 bulan	4.709.074.226	DAU	-	55 orang / 12 bulan	6.330.378.566
4	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	7.032.317	DAU	-	4 dokumen	2.932.482
4	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Laporan	7.198.564	DAU	-	2 Laporan	7.686.525
4	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	13 Laporan	16.334.988	DAU	-	13 Laporan	81.221.258
4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan	957.253.954	DAU	-	12 Laporan	1.266.283.795
							Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%				100%	
4	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	47.584.365	DAU	-	1 paket	46.498.567
4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12 paket	136.978.296
4	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	53.570.575	DAU	-	1 paket	22.268.961

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	255.156.096	DAU	-	50 paket	322.478.274
4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	28.022.918	DAU	-	2 paket	24.261.168
4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	263.400.000	DAU	-	6 Dokumen	222.414.359
4	02	01	2	06	07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	1 paket	26.081.477
4	02	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	66 Laporan	49.900.000	DAU	-	66 Laporan	47.753.086
4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	259.620.000	DAU	-	11 Laporan	417.549.607
4	02	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Layanan umum kantor	12 bulan	2.157.813.320	DAU	-	12 bulan	2.664.204.990
						Persentase Penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	100%					
4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Air	12 laporan	450.933.320	DAU	-	12 laporan	573.470.190
4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor	12 laporan	1.706.880.000	DAU	-	12 laporan	2.090.734.800
4	02	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang milik daerah terpelihara	67 Unit	317.073.632	DAU	-	71 Unit	508.841.467
						Persentase Barang Milik daerah Kondisi Baik	100%	100%					
4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	4 Unit	68.000.000
4	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	219.246.980	DAU	-	31 Unit	257.400.493
4	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	50 unit	4.604.595
4	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	56.574.800	DAU	-	25 unit	64.973.830

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	41.251.852	DAU	-	3 unit	105.719.091
4	02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	3 unit	8.143.459
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 Laporan	25.868.416.840	DAU	-	12 Laporan	35.247.673.982
							Persentase layanan kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi	100%				100%	
4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang / 12 bulan	25.241.893.600	DAU	-	50 orang / 12 bulan	34.972.904.871
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	609.023.240	DAU	-	5 paket	249.147.361
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	50 orang	17.500.000	DAU	-	50 orang	25.621.750
4	01	01	05	16		Layanan Administrasi DPRD	Laporan layanan administrasi DPRD	125 dokumen	446.502.882	DAU	-	139 dokumen	816.930.365
							Persentase rapat yang terfasilitasi	100%				100%	
4	01	01	05	16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	-	-	-
4	01	01	05	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 laporan	35.632.117	DAU	-	9 dokumen	7.862.217
4	01	01	05	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dokumen Rapat Alat Kelengkapan DPRD	114 dokumen	410.870.765	DAU	-	130 dokumen	329.068.148
4	01	01	05	16	04	Fasilitasi Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-	-	-	-	1 Paket	480.000.000
4	02	02				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	70.00%	13.806.928.304	DAU	-	72.50%	14.410.102.799
							Pembahasan LKPJ Tepat Waktu	Kesesuaian aturan				Kesesuaian aturan	
							Penetapan persetujuan APBD Tepat waktu	Kesesuaian aturan				Kesesuaian aturan	
							Berita yang dipublikasikan	760 Berita				760 Berita	

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4	02	02	2	01	Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Rancangan Peraturan daerah	6 Ranperda	1.024.586.064	DAU	-	6 Ranperda	1.038.431.243	
						Peraturan DPRD yang dibahas	2 Peraturan DPRD				2 Peraturan DPRD		
						Persentase Perda yang ditetapkan	70%				72,50%		
4	02	02	2	01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	13.130.872	DAU	-	1 dokumen	168.569.154
4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 dokumen	778.443.353	DAU	-	12 dokumen	413.718.342
4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 dokumen	201.950.000	DAU	-	2 dokumen	110.000.000
4	02	02	2	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	31.061.839	DAU	-	-	-
4	02	02	2	02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	5 dokumen	339.446.324	DAU	-	5 dokumen	741.272.366	
						Persentase Kebijakan Anggaran dibahas tepat waktu	100%				100%		
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	35.266.735	DAU	-	1 dokumen	132.098.423
4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	34.837.975	DAU	-	1 dokumen	110.003.689
4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	69.173.796	DAU	-	1 dokumen	186.251.089
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	160.287.516	DAU	-	1 dokumen	136.619.563
4	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	39.880.302	DAU	-	1 dokumen	176.299.602
4	02	02	2	03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	6 dokumen	284.900.845	DAU	-	6 dokumen	58.564.000	
						Persentase pelaksanaan pengawasan	100%				100%		

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 laporan	50.938.219	DAU	-	1 laporan	9.516.650
4	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan	50.954.436	DAU	-	1 laporan	10.980.750
4	02	02	2	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	50.363.436	DAU	-	1 laporan	9.516.650
4	02	02	2	03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan	51.012.936	DAU	-	1 laporan	9.516.650
4	02	02	2	03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 Dokumen	41.785.219	DAU	-	1 Dokumen	9.516.650
4	02	02	2	03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	39.846.599	DAU	-	1 Dokumen	9.516.650
4	02	02	2	04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas</b>	<b>20 dokumen</b>	<b>3.005.861.186</b>	DAU	-	<b>19 dokumen</b>	<b>5.656.891.487</b>
							<b>Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek diatas 20 Jam</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
4	02	02	2	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	3.206.724	DAU	-	-	-
4	02	02	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD/Bimtek DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	633.662.724	DAU	-	6 dokumen	2.106.148.845
4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	410.400.000	DAU	-	10 orang	527.076.000
4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 orang	324.000.000	DAU	-	9 orang	474.368.400
4	02	02	2	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	DAU	-	12 dokumen	44.787.600
4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	3.670.709	DAU	-	1 dokumen	21.961.500

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
4	02	02	2	04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	510 dokumen	1.630.921.029	DAU	-	510 dokumen	2.482.549.143
4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Aspirasi Masyarakat	43 dokumen	4.000.143.375	DAU	-	41 dokumen	5.771.157.565
					Persentase Anggota DPRD yang Menyampaikan aspirasi tepat waktu		100%	100%					
4	02	02	2	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	42.615.733	DAU	-	3 Laporan	20.705.302
4	02	02	2	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.568.381	DAU	-	1 Dokumen	15.141.722
4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	40 dokumen	3.944.959.261	DAU	-	38 dokumen	5.735.310.541
4	02	02	2	06		Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Pengawasan Kode etik DPRD	-	-	-	-	1 dokumen	7.920.000
					Persentase rekomendasi pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti		-	-	-	100%			
4	02	02	2	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	1 laporan	7.920.000
4	02	02	2	07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Dokumen Hasil Pembahasan Kerjasama Daerah	-	-	DAU	-	2 dokumen	12.064.184
					Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti		100%	100%					
4	02	02	2	07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-	-	DAU	-	1 dokumen	7.363.092
4	02	02	2	07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	DAU	-	1 dokumen	4.701.092
4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	29 dokumen	482.197.597	DAU	-	31 dokumen	1.469.945.702
					Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu		100%	100%					
4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	438.676.412	DAU	-	10 Dokumen	1.203.547.582

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD													
KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4	02	02	2	08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	7.388.261	DAU	-	1 laporan	11.893.616
4	02	02	2	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Dokumen	31.322.219	DAU	-	8 Dokumen	89.968.945
4	02	02	2	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	4.810.705	DAU	-	12 Dokumen	164.535.558
								<b>JUMLAH</b>	<b>43.664.288.126</b>				<b>61.379.194.544</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan program kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul pada saat Rencana Kerja dilaksanakan dan sebagai tolok ukur Akuntabilitas Kinerja, sehingga Rencana Kerja (Renja) harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaksana program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang meliputi:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
  - **Prioritas dan Skala Prioritas:** Ketika ketersediaan anggaran terbatas, penting untuk menetapkan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Identifikasi program dan kegiatan yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Skala prioritas dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada area yang paling penting dan mendesak.
  - **Revisi dan Penyesuaian:** Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. Evaluasi ulang program dan kegiatan yang direncanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengurangan atau penyesuaian yang dapat dilakukan tanpa mengorbankan tujuan utama. Fleksibilitas dan kreativitas dalam mengadaptasi rencana menjadi penting dalam situasi seperti ini.
  - **Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya:** Dalam kondisi keterbatasan anggaran, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini meliputi peninjauan ulang dan penyesuaian alokasi anggaran, pengurangan biaya yang tidak penting atau efisiensi, serta pemanfaatan sumber daya internal dan eksternal yang tersedia. Pemilihan strategi yang tepat dan pengaturan anggaran yang cermat dapat membantu mengatasi keterbatasan tersebut.
  - **Transparansi dan Komunikasi:** Penting untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi yang jelas dengan pihak-pihak terkait. Informasikan secara terbuka tentang situasi anggaran yang ada, perubahan yang dilakukan, dan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi keterbatasan. Dengan demikian, akan tercipta pemahaman dan kepercayaan dari semua pihak terkait.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Dalam pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah, terdapat beberapa kaidah atau prinsip pelaksanaan yang dapat menjadi panduan. Berikut ini adalah beberapa kaidah pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah:

- Kaidah Keterpaduan: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus terpadu dan sejalan dengan rencana kerja yang lebih tinggi, seperti RKPD dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini memastikan bahwa tujuan dan program kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan.
- Kaidah Partisipasi: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terkait, termasuk internal Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah, masyarakat, mitra kerja, dan sektor swasta. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi, pertemuan, diskusi, atau mekanisme lain yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan kontribusi.
- Kaidah Pengendalian: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus didukung dengan sistem pengendalian yang efektif. Pengendalian ini meliputi pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap capaian hasil, identifikasi permasalahan, dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan.
- Kaidah Akuntabilitas: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus dilakukan secara akuntabel. Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, memenuhi indikator kinerja, dan menggunakan anggaran dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan yang transparan, pelaporan yang jelas, dan pertanggungjawaban yang akurat harus diterapkan.
- Kaidah Keberlanjutan: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Keberlanjutan mencakup pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta perencanaan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keterkaitan antargenerasi.
- Kaidah Efektivitas dan Efisiensi: Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara efisiensi berarti melakukan penggunaan sumber daya secara optimal. Pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan penggunaan metode kerja yang tepat akan berkontribusi pada pencapaian hasil yang optimal.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang telah disusun dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Adapun Rencana Kerja ini menggambarkan arah kebijakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini secara umum adalah melaporkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu tolok ukur pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah. Laporan ini memuat secara rinci dan lengkap pencapaian kinerja suatu instansi terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan/sasaran, kebijakan dan program yang disusun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Praya, 12 Juli 2023  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Lombok Tengah, 7



**SUHADI KANA, S.Sos., M.H.**  
NIP.197405151997031009